

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peradaban yang bergerak dinamis tidak hanya memberikan efek kepada kehidupan manusia, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi dan keadaan lingkungan. Seiring dengan majunya waktu, kemajuan ekonomi dapat ditandai dengan bertambahnya sektor perusahaan yang bermacam-macam serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan tersebut meningkatkan aktivitas bisnis dan memicu hasrat perusahaan untuk mementingkan keuntungan (*profit*) (Suharyani et al., 2019). Suatu sebab pastinya akan memberikan akibat, begitu pula dengan aktivitas bisnis yang menggelora pastinya juga akan memberikan dampak, baik pada perusahaan itu sendiri; kehidupan manusia; maupun lingkungan. Keberadaan suatu perusahaan memiliki dampak positif dan negatif. Meskipun perusahaan mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, tidak jarang masyarakat juga menerima dampak negatif akibat kegiatan bisnis perusahaan. Banyak insiden ketidakpuasan publik yang muncul, terkait dengan isu-isu seperti pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil terhadap pekerja, dan hal-hal sejenisnya (Yuliawati et al., 2020).

Insiden terkait lingkungan dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara, misalnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim, tidak heran jika suatu permasalahan datang dari wilayah perairan. Salah satunya yaitu permintaan pencabutan perizinan penambahan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Timah di pesisir laut Desa Batu Beriga (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024)¹. Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan bahwa masyarakat pesisir di Kepulauan Bangka Belitung telah menolak eksploitasi tambang timah di laut sejak awal rencana tersebut. Dia menyatakan bahwa penetapan pola ruang untuk pertambangan timah di pesisir-laut Batu Beriga merupakan kebijakan yang salah.

Laut memberikan harapan bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung di tengah kerusakan ekosistem terestrial yang terus terjadi. Selama ratusan tahun, wilayah pesisir laut telah dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana dan menguntungkan. Laut Batu Beriga adalah habitat penting bagi terumbu karang dan mamalia laut yang dilindungi, seperti dugong dan lumba-lumba, menurut Hafiz. Bentang alam pesisir-laut juga merupakan tempat tradisional untuk tangkap nelayan.

Hafiz menyatakan, "Wilayah pesisir laut Desa Batu Beriga merupakan ekosistem esensial yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi

¹ <https://www.walhi.or.id/walhi-kepulauan-bangka-belitung-mendesak-menteri-esdm-mencabut-iup-pt-timah-di-pesisir-laut-desa-batu-beriga>

(NKT). Selain itu, lebih dari 80 persen masyarakat Desa Batu Beriga bergantung pada hasil laut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi menteri ESDM untuk tidak mencabut IUP PT Timah di laut Batu Beriga."

Hafiz menjelaskan bahwa kandungan logam berat (Pb, Cd, Cr) dalam limbah cair yang dihasilkan dari penambangan timah lebih tinggi dari standar lingkungan. Akibatnya, limbah cair tersebut merupakan bahan pencemar lingkungan. Hal ini diperparah dengan limbah tambang timah yang dibuang secara langsung atau di atas permukaan laut. Karena arus laut yang selalu berubah, limbah penambangan dapat bergerak sejauh 6-7 mil, sehingga sangat mengganggu daerah tangkap nelayan (Thea, 2024)².

Selain itu, penambangan timah lepas pantai telah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem terumbu karang di Bangka Belitung yang telah berkurang sebanyak 64.514 hektar dalam kurun waktu 2 tahun. Hafiz juga menyampaikan korupsi sektor pertambangan timah yang menyebabkan kerugian negara 271 T akibat kerusakan lingkungan di kawasan hutan dan non kawasan hutan, merupakan bukti kegagalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, aktivitas penambangan juga terus memakan korban. Berdasarkan data kompilasi

² <https://metro.tempo.co/read/1867158/walhi-bangka-belitung-dan-masyarakat-tuntut-pemerintah-cabut-izin-tambang-timah-batu-beriga>

Walhi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang 2021-2024, ada 31 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang, dan 22 orang mengalami luka-luka.

Hingga saat ini, di Kepulauan Bangka Belitung, ada ribuan kolong yang belum direklamasi. Tercatat di tahun 2018, jumlah kolong yang tersebar di semua wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas 12.607 kolong dengan total luasan 15.579,747 hektar

Hafiz menegaskan pentingnya mengevaluasi seluruh perizinan pertambangan timah dengan mengeluarkan kebijakan moratorium tambang. Selain itu, transformasi tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan harus menjadi agenda utama sebagai upaya pemulihan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Apabila hal-hal di atas semakin dihiraukan maka semakin terbuka peluang korupsi sumber daya alam, dan eksploitasi tambang timah akan memperluas kerusakan lingkungan, menambah korban jiwa, serta mempertajam konflik horizontal akibat fragmentasi masyarakat

Selain negara kepulauan, Indonesia juga dikenal dengan negara yang kaya akan lahan subur dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah hingga dijuluki sebagai negara agraris. Namun, kondisi tersebut juga menuai banyak konflik antara perusahaan dan masyarakat di berbagai daerah yang hingga kini belum diketahui bagaimana cara

menuntaskannya. Thea (2024)³ melalui laman Hukumonline.com melaporkan bahwa Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 214 konflik agraria struktural selama tahun 2023, dengan 3 sektor bisnis penyumbang konflik agrarian terbesar yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Sektor Bisnis Penyumbang Konflik Agraria Terbesar

Sektor	Jumlah Konflik	Luas lahan	Jumlah kepala keluarga	Desa terdampak	Keterangan
Perkebunan dan Agribisnis	108	124.545	37.553	164	<ul style="list-style-type: none"> a. Komoditas sawit 88 konflik b. Komoditas tebu 6 konflik c. Komoditas kelapa 5 konflik d. Komoditas Pisang dan Teh masing-masing 2 konflik e. Komoditas karet, cengkeh, dan peternakan masing-masing 1 konflik
Properti	44	64.119	33.206	49	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumahan 17 konflik b. Aset pemerintah 7 konflik c. Kawasan industri 6 konflik d. Kampus dan pariwisata masing-masing 3 konflik e. Villa, <i>sport center</i>, dan hotel

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sektor-bisnis-ini-penyumbang-terbesar-konflik-agraria-sepanjang-2023-lt65a50a011f3ba/?page=1>

					masing-masing 1 konflik
Pertambangan	32	127.525	48.622	57	a. Komoditas nikel 15 konflik b. Batubara 6 konflik c. Pasing dan emas masing-masing 5 konflik d. Batu kapur 1 konflik

Sumber: <https://www.hukumonline.com> (2023)

Selain ketiga sektor tersebut, terdapat sektor lain yang turut menyumbang konflik agraria seperti proyek infrastruktur sebanyak 30 (tiga puluh) konflik dengan rincian, kehutanan sebanyak 17 (tujuh belas) konflik, pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 5 (lima) konflik, serta pembangunan fasilitas militer sebanyak 5 (lima) konflik.

Diantara 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia, terdapat 10 provinsi dengan konflik agrarian tertinggi yakni Sumatra Utara dengan 30 konflik, Sulawesi Selatan 19 konflik, Riau 16 konflik, Jambi 15 konflik, Bengkulu 12 konflik, Kalimantan Timur 12 konflik, Jawa Timur 11 konflik, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 10 konflik.

Konflik-konflik tersebut menimbulkan problematika baru yakni kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat yang mempertahankan lahannya, dengan rincian 508 korban kriminalisasi, 79 korban penganiayaan, 6 ditembak, dan 3 tewas.

Menurut Dewi, salah satu faktor utama terjadinya konflik agraria ini adalah adanya investasi dan model pembangunan di sektor perkebunan infrastruktur, properti, kehutanan, termasuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyumbang 115 konflik, seperti tol Padang-Pekanbaru, proyek Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, dan bendungan Wadas (Thea, 2024).

Dilema lingkungan dan sosial juga terjadi di perusahaan tambang batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Fenomena tersebut didokumentasikan melalui film dokumenter “*Sexy Killers*” oleh akun Youtube *Watchdoc Image*. Film dokumenter tersebut secara spesifik mengisahkan tentang perusahaan tambang batu bara yang seolah-olah menjadi pembunuh senyap akibat proses produksi, distribusi, hingga konsumsinya yang memberikan dampak negatif pada lingkungan dan warga sekitar berupa bekas galian yang tidak direklamasi sehingga memakan korban, kapal muat batubara yang melindas dan meratakan terumbu karang kepulauan Karimunjawa, hingga menyebarkan uap buruk yang menggerogoti organ pernafasan masyarakat sekitar (Watchdoc Image, 2019; Murfianti, 2020).

Tidak hanya fenomena alam, fenomena sosial tentang diskriminasi gender, terutama perempuan, juga kerap terjadi. Dilansir dari situs Katadata.co.id, Bayu (2019) melaporkan bahwa terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan, termasuk keterlibatan mereka dalam situasi kemiskinan, diskriminasi, dan tindak kekerasan nyaris dapat

dijumpai di berbagai sektor industri. Tingkat kemiskinan tercermin dari ketidaktersediaan tunjangan bagi para pekerja perempuan, tingkat upah yang rendah, dan kurangnya kompensasi untuk pekerjaan lembur. Berdasarkan situs tersebut, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, menyatakan bahwa perempuan tidak jarang mendapatkan status pekerja kontrak daripada laki-laki, serta banyak perusahaan yang belum memberikan dukungan penuh terhadap hal kesehatan reproduksi perempuan, seperti memberikan izin khusus atau cuti untuk masa menstruasi dan melahirkan dan fasilitas untuk menyusui. Melalui situs [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), Arief (2022)⁴ melaporkan bahwa ketidaksetaraan perlakuan juga terjadi pada Direktur *People and Culture Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia*, Lucia Karina. Lucia mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja di perusahaan yang membedakan upah serta jabatan struktural antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perempuan dianggap tidak bisa menjalankan fungsi manajemen dengan baik dan terlalu menyampurakan intuisi daripada logika mereka.

Contoh peristiwa-peristiwa tersebut pastinya tidak memberikan kesejahteraan untuk lingkungan dan masyarakat. Sebaliknya, seharusnya perusahaan tidak hanya memberikan kemajuan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam kemajuan kesejahteraan baik dalam

⁴ <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6260fe6ac99a0/kisah-perempuan-di-industri-hadapi-diskriminasi-upah-hingga-jabatan>

lingkungan maupun sosial. Apabila masyarakat beranggapan perusahaan bersikap acuh terhadap aspek lingkungan dan sosial, dan merasakan langsung dampak negatif dari operasi suatu perusahaan, maka hal tersebut dapat menimbulkan oposisi publik dan juga gejolak sosial (Kusumawardani, 2022).

Permasalahan lingkungan dan sosial membuat paradigma baru yang bermunculan terkait transparansi perusahaan dalam melaksanakan operasinya. Paradigma tersebut dapat dinilai lebih kompleks karena citra perusahaan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial (Aprilya Tobing, 2019). Investor serta *stakeholder* menuntut perusahaan melakukan pelaporan secara transparan dan akuntabel atas dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh perusahaan (Surya Abbas et al., 2023). Laporan tahunan sudah dianggap tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Berangkat dari hal tersebut, dibuatlah laporan keberlanjutan atau yang juga dikenal dengan *Sustainability Report*. Laporan ini mengadopsi konsep teori keberlanjutan (*sustainability*) yang menyatakan kebutuhan hari ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang (Bini & Bellucci, 2020:9). *Sustainability report* dibuat secara terpisah dengan laporan tahunan untuk menghindari ketidaksempurnaan audit dalam praktik ekonomi yang memicu hasrat pihak manajemen dalam merekayasa laba perusahaan yang dilaporkan

untuk memaksimalkan kepentingannya, sehingga perilaku *opportunist* mereka dapat mengiring untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan guna mengalihkan perhatian pengguna laporan keuangan dari manipulasi laba (Yuliatwati et al., 2020). Melalui *sustainability report*, perusahaan dapat mengevaluasi dampak kontribusinya terhadap perbaikan kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial di tingkat lokal, regional, bahkan global. *Sustainability report* menjadi pernyataan lengkap serta transparan tentang kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan bumi (Villiers & Maroun, 2018:2-3). *Sustainability Report* menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL). Menurut Elkington (1998) pada Bini & Bellucci (2020:11) TBL mencakup *People*, *Planet*, dan *Profit* untuk mengungkapkan bentuk pertanggungjawaban ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya membahas terkait dengan lingkungan, *sustainability report* juga membantu mengungkapkan informasi perusahaan yang berkaitan dengan nilai sosial. Misalnya, tentang bagaimana perusahaan memitigasi praktik-praktik yang bertentangan dengan etika, penyuapan, mempekerjakan tenaga kerja anak, iklim kerja yang negatif, dan korupsi (Kusumawardani, 2022).

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengkaji tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang beroperasi. Keuangan berkelanjutan untuk perusahaan

finansial, emiten, dan perusahaan publik juga diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Kewajiban perusahaan menyusun dan menerbitkan *sustainability report* diatur dan dijelaskan pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 10. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada sanksi yang dianggap sepadan tentang laporan keberlanjutan. Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 13, sanksi terkait laporan keberlanjutan adalah sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Padahal, melihat banyaknya fenomena tentang lingkungan di Indonesia menunjukkan perlunya laporan ini untuk *men-disclose* aktivitas perusahaan beserta mitigasi risikonya secara transparan dan kredibilitas karena dampak yang ditimbulkan dapat sangat material.

Dilansir dari *website* PwC Indonesia (2023)⁵, pada tahun 2022, pengungkapan *sustainability report* di Indonesia meningkat sebanyak 88% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut menggambarkan kemajuan yang positif bagi negara berkembang yang memiliki julukan Negara Maritim ini karena Lawrence Loh dalam Meinawati & Wirakusuma (2023) mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia menempati kedudukan terendah dalam pengungkapan *sustainability report* dari lima negara ASEAN. Pada penelitian Zarefar et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara terendah dalam mengungkapkan *sustainability report* jika dibandingkan tiga negara

⁵ <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/indonesian/tren-dan-arrah-sustainability-report-indonesia-di-masa-mendatang.html>

berkembang lainnya. Meskipun demikian, perkembangan tren dan urgensi *sustainability report* di Indonesia tidak menjamin dapat digunakan sebagai tolok ukur perkembangan praktik keberlanjutan.

Hasil analisis oleh Sebrina et al. (2023) menyimpulkan bahwa penyebaran *sustainability report* yang *stand alone* serta laporan yang sesuai Standar GRI di Indonesia masih terbilang rendah. Faktor ini menunjukkan bahwa fenomena *sustainability report* di Indonesia tidak mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa keberhasilan manajemen bisnis suatu organisasi melibatkan upaya untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dipersepsikan beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dianggap sah. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan *sustainability report* untuk memperkuat reputasinya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kualitas dan kredibilitas laporan tersebut dapat terjamin atau hanya sebuah formalitas untuk meningkatkan citra perusahaan. *Sustainability report* yang hanya digunakan sebagai formalitas dan terlalu diromantisasi dapat menyebabkan *greenwashing*, yaitu praktik perusahaan yang mengekspos diri mereka sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial, tetapi sebenarnya hanya untuk meningkatkan citra mereka tanpa melakukan tindakan nyata yang signifikan (Live More Society, 2021)⁶. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari *stakeholder* atau pemangku

⁶ https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/articles/livemorekind/2021-apa-itu-greenwashing.html

kepentingan dan merusak reputasi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus memastikan bahwa *sustainability report* yang dibuat benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, serta didukung oleh tindakan nyata yang signifikan (Dayan, 2020).

Munculnya paradigma dan skeptisme baru terkait kinerja serta operasi perusahaan yang timbul dari *stakeholder* bukan menjadi hal yang remeh dalam *sustainability report*. Menurut *stakeholder theory*, perusahaan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingannya, sehingga *stakeholder* dapat memberikan dukungan atas eksistensi perusahaan tersebut. Apabila perusahaan mampu menyajikan informasi dengan baik kepada *stakeholder*, maka hal tersebut dapat meningkatkan legitimasi yang membuat *image* perusahaan bagus di mata *stakeholder* maupun publik (Darmawan & Sudana, 2022). Desakan ataupun tekanan dari para pemangku kepentingan mengharuskan perusahaan memberikan informasi yang baik, relevan, serta transparan sehingga ekspektasi *stakeholder* atas citra perusahaan dapat terbangun dan terpenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh Octora & Amin (2023), membagi tekanan *stakeholder* menjadi empat bagian, yaitu tekanan lingkungan, tekanan konsumen, tekanan *shareholder*, dan tekanan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan keempat indikator tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kualitas *sustainability report*. Akan tetapi, terdapat hasil yang berbeda pada

penelitian Darmawan & Sudana (2022). Dengan indikator tekanan *stakeholder* yang sama, hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa tekanan lingkungan berpengaruh positif terhadap *sustainability report*, tekanan karyawan dan tekanan pemegang saham tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*, sedangkan tekanan konsumen berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*. Hasil penelitian yang bersifat inkonsisten mendorong peneliti untuk mengkaji seberapa besar pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* dengan indikator yang sama, yaitu tekanan lingkungan, tekanan konsumen, tekanan karyawan, dan tekanan investor.

Eksistensi *sustainability report* dan juga tuntutan dari banyak pihak, menuai kekhawatiran baru, yaitu fakta kenaikan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia tanpa dibarengi kenaikan kualitas laporannya (PwC Indonesia, 2023). *External assurance* (penjamin eksternal) menjadi salah satu aspek untuk memitigasi kekhawatiran tersebut (Dayan, 2020). Penjamin dibutuhkan untuk memastikan kualitas laporan tersebut dengan menguji keabsahan suatu *sustainability report*. Selain itu, penjamin juga dapat membantu meminimalisir tingkat asimetri informasi *sustainability report* perusahaan, sehingga dapat meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan tersebut (Harindahyani & Agustia, 2023). Di Indonesia, regulasi terkait penggunaan *external assurance* dalam *sustainability report* juga belum

tersedia. Beberapa perusahaan belum menggunakan jasa *assurance* pada *sustainability report*-nya. Tidak adanya peraturan yang mengikat tentang kewajiban menggunakan *assurance* bagi *sustainability report*, membuat beberapa perusahaan tidak menggunakan jasa tersebut. Padahal, dengan adanya *external assurance* yang nantinya menerbitkan *assurance statement* yang akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas *sustainability report* perusahaan tersebut (Harymawan et al., 2020; Susanti et al., 2022; Murthin & Septiani, 2022).

External assurance akan menjalankan proses di mana suatu pihak independen atau lembaga audit eksternal meninjau dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam *sustainability report* suatu perusahaan. Penggunaan *external assurance* dalam *sustainability report* menjadi semakin penting karena meningkatnya permintaan dari pemangku kepentingan untuk informasi yang dapat dipercaya dan transparan mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan (Harymawan et al., 2020). Dengan adanya *external assurance*, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan reputasi mereka di mata *stakeholder*, termasuk karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Maka dari itu, penggunaan *external assurance* menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini untuk meneliti pengaruhnya terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Selain tekanan *stakeholder* dan *external assurance*, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam

pengungkapan *sustainability report*. Dalam mengambil keputusan, investor dan juga pemegang saham akan mempertimbangkan besar dan kecilnya perusahaan yang digambarkan melalui ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung melakukan lebih banyak aktivitas dan operasional yang dapat menimbulkan dampak besar (Madani & Gayatri, 2021). Perusahaan yang besar akan memiliki tingkat informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dalam hasil penelitiannya, Surya Abbas et al. (2023) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kemudian, hasil penelitian dari (Madani & Gayatri, 2021) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada pengungkapan *sustainability report*. Hal tersebut selaras dengan prinsip *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengelolaan sumber daya perusahaan. Berdasarkan konsep legitimasi, aktivitas perusahaan besar lebih terlihat secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar lebih rentan terhadap tuntutan dan tekanan yang datang dari masyarakat (Made et al., 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti akan meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Perusahaan yang telah berstatus *go public*, akan menjual sahamnya kepada masyarakat dengan beberapa tujuan antara lain

penambahan modal, meningkatkan valuasi perusahaan, dan melakukan ekspansi pasar. Perusahaan-perusahaan tersebut akan tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah melaksanakan persyaratan-persyaratan hingga berstatus *go public*. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang mampu mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial yang berkualitas dan transparan cenderung memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Sehingga, dapat membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan perusahaan *go public* di kalangan pihak eksternal seperti investor, konsumen, dan masyarakat serta dapat meningkatkan jumlah investor (Pradani & Lestari, 2022; Djony Saputro et al., 2022).

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Tekanan *Stakeholder*, Penggunaan *External Assurance*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan *Go Public*”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tekanan lingkungan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
2. Bagaimana pengaruh tekanan konsumen terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
3. Bagaimana pengaruh tekanan karyawan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

4. Bagaimana pengaruh tekanan investor terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
5. Bagaimana pengaruh penggunaan *external assurance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh tekanan lingkungan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh tekanan konsumen terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh tekanan karyawan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh tekanan investor terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh penggunaan *external assurance* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
6. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sudut pandang ataupun paradigma tentang pengaruh tekanan *stakeholder*, *external assurance*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.
2. Penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik pengungkapan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk lebih responsif terhadap tuntutan dan harapan *stakeholder*.
3. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif kepada investor serta *stakeholder* dalam menganalisis dan mengambil tindakan terhadap tren dan isu yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan.

1.4.2. Manfaat Akademis

1. Bagi Peneliti

Proses penyusunan, penelitian, hingga penyelesaian penulisan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir kritis peneliti dalam menanggapi suatu isu dengan sudut pandang yang lebih kompleks tentang *sustainability report*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam literatur akademis tentang praktik pengungkapan *sustainability report*, dengan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tersebut dan menguji hubungannya secara empiris. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya tentang praktik pengungkapan laporan keberlanjutan, dengan mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi pengungkapan tersebut dan konteks bisnis yang berbeda.

3. Bagi Pembaca

Penelitian diharapkan dapat memicu *awareness* terhadap perputaran suatu bisnis dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup.